

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari Gambaran laporan hasil yang terdapat pada bab IV, dapat diambil beberapa Kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Gambaran analisis preferensi tenaga pembuat jukung terhadap program jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala, preferensi mereka mungkin bisa dikatakan tingkat pengetahuan yang masih rendah, mayoritas tenaga kerja belum sepenuhnya memahami manfaat dan fungsi terhadap program BPJS ketenagakerjaan, termasuk jenis perlindungan yang diberikan,
2. Keterbatasan ekonomi penghasilan yang tidak menentu dan relatif rendah membuat sebagian besar tenaga pembuat jukung enggan untuk mengalokasikan dana iuran BPJS, prioritas kebutuhan sehari-hari pendapatan yang tidak menentu membuat para pekerja lebih memprioritaskan kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, dan kebutuhan keluarga daripada membayar iuran jaminan sosial. Masih banyaknya perusahaan yang tidak memberikan hak bagi tenaganya yaitu tidak menguruskan BPJS Ketenagakerjaan tenaganya yang notaben merupakan suatu hal yang wajib didapatkan oleh setiap tenaga kerja, kurangnya kesadaran dari tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka jika terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan

kerja saat melakukan pekerjaan, kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, terkena paparan zat kimia berbahaya, bisa terjadi cacat sebagian (misalnya kehilangan jari, tangan, atau fungsi tubuh tertentu, cacat total tetap (misalnya lumpuh, kebutaan) BPJS memberikan kompensasi finansial sesuai jenis dan tingkat kecacatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan literasi dan sosialisasi, disarankan agar para pembuat jukung diberikan sosialisasi rutin oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atau pemerintah desa mengenai manfaat, jenis program, dan prosedur pendaftaran. Penyuluhan sebaiknya dilakukan dalam bahasa lokal dan dengan pendekatan yang sesuai budaya setempat.
2. Fasilitasi pendaftaran kolektif, pemerintah desa atau lembaga terkait dapat memfasilitasi pendaftaran kolektif bagi para pembuat jukung agar prosesnya lebih mudah dan tidak memberatkan secara administrasi.
3. Subsidi atau bantuan iuran, mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan subsidi atau insentif bagi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal seperti pembuat jukung, khususnya yang berpenghasilan rendah.
4. Pembentukan kelompok atau koperasi, mendorong pembentukan kelompok kerja atau koperasi pembuat jukung agar lebih mudah dalam mengakses

program jaminan sosial secara bersama-sama dan meningkatkan posisi tawar terhadap instansi terkait.

5. Peningkatan kesadaran perlindungan kerja, mengedukasi tenaga pembuat jukung tentang pentingnya perlindungan sosial terhadap risiko kerja, seperti kecelakaan, kematian, atau hari tua.
6. Kolaborasi dengan LSM atau perguruan tinggi, menggandeng LSM atau mahasiswa untuk melakukan pendampingan dan advokasi terhadap hak-hak sosial pembuat jukung.